



Dampak Multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Jakarta

Baihaqi Ashar*, Hendi Pratama

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract: Kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan atau ketidakmerataan ekonomi merupakan masalah serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah salah satu masalah yang paling penting. Kesenjangan ini tercermin dalam perbedaan pendapatan, akses ke fasilitas, dan kualitas hidup antara masyarakat yang berbeda. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kota besar tidak luput dari masalah kesenjangan dan kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pemerintah telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak Program Keluarga Harapan yang ditinjau dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hukum, tata kelola, dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif kualitatif dengan teknik analisis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam jangka pendek dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan namun dinilai masih kurang efisien. PKH masih sering salah sasaran dan penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan jadwal.

Keywords: Program Harapan Keluarga, Kemiskinan, Kesenjangan, Kesejahteraan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.358>

*Correspondence: Baihaqi Ashar

Email: baihaqiazar@gmail.com

Received: 12-06-2024

Accepted: 14-06-2024

Published: 19-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: Significant gaps in income distribution or economic inequality are a serious problem in many developing countries, including Indonesia. Social and economic disparities are one of the most important issues. This gap is reflected in differences in income, access to facilities, and quality of life between different communities. Jakarta as an economic center and a big city is not immune from the problem of inequality and poverty. In overcoming the problem of poverty and inequality the government has issued the Family Hope Program (PKH). The purpose of this study is to determine the impact of the Family Hope Program in terms of various aspects such as social, economic, legal, governance, and environment. The research method used is descriptive qualitative qualitative with literature study analysis techniques. The results show that the Family Hope Program (PKH) is effective in the short term in dealing with poverty and inequality but is still considered less efficient. PKH is still often mistargeted and the distribution of assistance is not on schedule.

Keywords: Family Hope Program, Poverty, Gap, Welfare

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi masalah sudah ada sejak dahulu kala dan masih terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut bagi seluruh dunia. Pada tahun 2000, melalui konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan sebuah kemiskinan sebagai target utama permasalahan yang harus diselesaikan pada program Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development*

Goals (MDGs)(Vania Grace Sianturi et al., 2021). Setelah program tersebut berjalan selama 15 tahun. Pada tahun 2015, program dari MDGs belum memenuhi target sehingga berlanjut ke program baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan program yang lebih luas lagi. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu berkurangnya kesenjangan atau *reduced inequality*. Kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan atau ketidakmerataan ekonomi merupakan masalah serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Amala & Mayang, 2018). Indonesia, yang memiliki banyak budaya dan wilayah yang beragam, menghadapi banyak masalah untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah salah satu masalah yang paling penting. Kesenjangan ini tercermin dalam perbedaan pendapatan, akses ke fasilitas, dan kualitas hidup antara masyarakat yang berbeda. Tingkat ketimpangan di Indonesia sejak september 2014 sampai september 2019 mengalami penurunan terus - menerus yang menunjukkan terjadinya perbaikan pemerataan. Namun, pandemi membuat gini rasio di Indonesia kembali mengalami peningkatan (Kementerian Keuangan, 2021). Salah satu kota besar dan pusat ekonomi Indonesia yaitu Jakarta juga menjadi penyumbang dari besarnya angka ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Kota yang memiliki penduduk sangat besar dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini telah menunjukkan kesenjangan sosial dan ekonomi dengan sangat jelas (Lestarie et al., 2024).



Gambar 1. Rasio gini DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (2023)

Berdasarkan grafik di atas, rasio gini di DKI Jakarta dari tahun 2014 sebesar 0,447 berhasil mengalami penurunan yang signifikan sampai tahun 2019 sebesar 0,394. Namun, dari tahun 2019 sampai 2022 kembali kenaikan rasio gini yang mana salah satu penyebab kenaikannya yaitu pandemi covid-19 (Sari & Gunawan, 2022). Kontribusi pengeluaran penduduk kelompok 40% terendah berkurang sedangkan kontribusi pengeluaran kelompok 20% teratas meningkat (DJPB Kemenkeu, 2020). Jumlah ketimpangan yang

meningkat menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah di Jakarta semakin besar. Jakarta memiliki rasio gini tertinggi kedua secara nasional di belakang Yogyakarta (Rizaty, 2022). Kemiskinan di Jakarta masih menjadi salah satu masalah utama. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 132.345 warga Jakarta pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori miskin ekstrem (Azzahra, 2022). Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin parah, menjadikan target menurunkan kemiskinan menjadi 2,78% di tahun 2023 menjadi sangat sulit (Nugraha, 2023).



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (2023)

Jika dilihat dari grafik di atas, jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 412,790 ribu menjadi 365,550 ribu pada tahun 2019. Namun kembali kenaikan yang signifikan atau melebihi tahun 2014 dari tahun setelahnya yaitu 2020 hingga 2023. Puncak tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebanyak 502,040 merupakan penduduk miskin (Bela & Sarmini, 2024). Hal ini sejalan dengan meningkatnya rasio gini pada gambar 1. Pendatang baru yang mencari pekerjaan juga menjadi salah satu faktor ketimpangan sosial di Jakarta. Mereka yang baru berproses mencari kerja dapat menambah tekanan pada sistem sosial dan ekonomi yang membuat kesenjangan semakin lebar. Meskipun ada beberapa tanda pemulihan ekonomi, masih banyak keluarga yang belum bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Meningkatnya kemiskinan di Jakarta selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan perlunya strategi yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang merata menjadi kunci utama mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan terutama kesenjangan ekonomi yaitu dengan memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) (Fikri, 2023). Program tersebut

memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) bagi mereka yang memang memenuhi syarat yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dalam hal kesehatan dan pendidikan (Hasan et al., 2020). Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 213,945 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan sebanyak 4,682 keluarga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebanyak 70,835 keluarga merupakan penerima bantuan sembako dan PKH (Kementerian Sosial, 2023).

	Kabupaten/Kota Regency/City	Kantor Pos Post Office	ATM ATM	Kantor Bank Bank office	Agen Bank Bank agent	Pendamping Companion
1.	Kepulauan Seribu	1.54	50.25	1.34	19.60	27.27
2.	Jakarta Selatan	2.98	38.46	31.60	1.48	25.48
3.	Jakarta Timur	4.81	63.71	0.00	7.58	23.90
4.	Jakarta Pusat	4.08	66.35	4.50	0.00	25.06
5.	Jakarta Barat	0.00	76.79	4.54	0.00	18.67
6.	Jakarta Utara	0.00	48.18	14.32	11.77	25.74
	DKI Jakarta	2.51	56.94	12.43	4.10	24.02

Gambar 3. Persentase Penyaluran PKH

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (2021)

Berdasarkan tabel di atas, persentase tempat penerimaan atau penyaluran PKH terbanyak yaitu melalui ATM sebanyak 56,94% dan paling sedikit melalui kantor pos yang hanya sebanyak 2,51%. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, adalah tujuan utama PKH, yang sekaligus berusaha untuk mempercepat pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)(Emalia et al., 2021). Penyaluran bantuan PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan dengan memperbaiki beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan(Iqbal, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian yang kami gunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif baik berupa data dengan kata-kata atau tertulis dan data lisan yang didapat dari subjek penelitian yang telah dipilih atau

diamati (Moleong, 1998). Penelitian metode kualitatif menggunakan data-data dan informasi yang tersedia pada seluruh media, baik dari lembaga resmi, media massa dan laman situs web yang tersebar pada internet. Teknik analisis yang digunakan adalah kajian studi literatur terkait efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat di jurnal-jurnal dan artikel ilmiah sebagai sarana dalam mengumpulkan informasi dengan pembahasan pada penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode waktu tahunan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Data yang digunakan untuk analisis ini adalah data konsumsi protein DKI Jakarta, Data kriminalitas DKI Jakarta, data pendidikan DKI Jakarta, data pengeluaran masyarakat DKI Jakarta dan data kesehatan DKI Jakarta (Resina et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kehidupan di DKI Jakarta memiliki taraf hidup yang sangat tinggi. Biaya kebutuhan yang diperlukan di Jakarta sangat besar sehingga jumlah keluarga miskin yang ada di DKI Jakarta menjadi sangat tinggi. Disisi lain, di Jakarta terdapat keluarga yang memiliki kehidupan yang mewah atau tersier sehingga kesenjangan dapat terlihat jelas karena wilayah hidup yang sama antara keluarga miskin dengan keluarga kaya. Untuk menentukan keluarga miskin, terdapat alat atau pengukuran yang digunakan, yaitu garis kemiskinan (Saharuddin, 2022). Garis kemiskinan merupakan pengukuran batas biaya atau taraf pada nominal tertentu yang dikeluarkan per kapita oleh individu sehingga bisa diklasifikasikan sebagai keluarga miskin. Berikut data garis kemiskinan di DKI Jakarta (Fahmi & Anwar, 2020):



Gambar 4. Grafik Kenaikan Garis Kemiskinan
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, 2024

Dari data diatas, terjadi kenaikan garis kemiskinan di DKI Jakarta. Garis kemiskinan dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan cenderung stabil pada setiap tahunnya. Kenaikan garis kemiskinan pada setiap tahunnya stabil dikisaran sebesar Rp. 30.000,- yang berarti kenaikan taraf hidup setiap tahunnya dipastikan naik sebesar 7%. Pada tahun 2014, garis kemiskinan di DKI Jakarta sebesar kisaran Rp. 440.000,-. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan yang sangat besar yaitu mencapai Rp. 60.000,- kenaikan tersebut sebesar dua kali lipat dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya sehingga garis kemiskinan mencapai kisaran Rp. 600.000,-. Pada tahun 2023 menjadi garis kemiskinan tertinggi dari periode data tersebut yaitu sebesar Rp. 790.000,- peningkatan selama 10 tahun terakhir sangat signifikan, yakni mencapai 80%. Oleh sebab itu, terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin pada 5 tahun terakhir. Dalam permasalahan kesenjangan ekonomi ini, penyelesaian oleh pemerintah berupa mengeluarkan salah satu kebijakan bantuan sosial berupa PKH(JUHAD, 2021).

Efektifitas dari program PKH ini dapat dilihat dari dampak yang disebabkan dari berjalannya program tersebut. Salah satunya dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Makanan menjadi faktor penting didalam kehidupan sehingga pengeluaran untuk makanan dapat dipastikan ada untuk seluruh keluarga(Hummairoh et al., 2021).

Kota/Kabupaten	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah) (Persen)											
	Makanan						Bukan Makanan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	66.31	65.74	63.19	64.15	62.85	62.12	33.69	34.26	36.81	35.85	37.15	37.88
Jakarta Selatan	38.28	36.65	33.4	37.95	37.74	38.37	61.72	63.35	66.6	62.05	62.26	61.63
Jakarta Timur	44.7	41.43	40.22	43.28	42.26	42.27	55.3	58.57	59.78	56.72	57.74	57.73
Jakarta Pusat	41.71	42.69	41.66	42.87	41.38	43.17	58.29	57.31	58.34	57.13	58.62	56.83
Jakarta Barat	37.41	46.4	39.68	43.98	42.26	35.77	62.59	53.6	60.32	56.02	57.74	64.23
Jakarta Utara	38.22	41.69	43.99	41.99	34.61	32.12	61.78	58.31	56.01	58.01	65.39	67.88
DKI Jakarta	39.94	41.58	40.7	41.84	39.54	37.75	60.06	58.42	59.3	58.16	60.46	62.25

Gambar 5. Tabel Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, 2024

Dari data diatas, terdapat perbedaan pengeluaran makanan dan bukan makanan dimana pengeluaran bukan makanan memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan oleh pengeluaran makanan. Data pengeluaran makanan rata-rata DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan tahun 2022 pengeluaran makanan cenderung menurun. Namun, dari kota yang berada di DKI Jakarta hanya kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020(Kustanto, 2019). Pada pengeluaran bukan pangan juga memiliki tren yang sebaliknya pada ketiga kota tersebut. Dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan pada pengeluaran bukan makanan. Sedangkan sisanya pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan pada

pengeluaran bukan makanan serta sisa dari kota tersebut juga mengalami peningkatan pada periode tersebut (Wahid et al., 2024).

Data mengenai pengeluaran makanan dan bukan makanan tersebut memiliki korelasi kepada konsumsi protein masyarakat wilayah DKI Jakarta. Protein merupakan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh manusia karena berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh terutama pada masa pertumbuhan tubuh seperti anak-anak (Almatsier, 2009). Apabila kurang mengonsumsi makanan yang mengandung protein, maka dapat berpengaruh kepada masalah kekurangan gizi (Ernawati et al., 2016).

Kab/Kota	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Gram)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kep Seribu	66.96	81.08	66.87	67.13	63.66	66.54
Jakarta Selatan	67.43	72.06	73.94	70.08	66.52	66.05
Jakarta Timur	69.66	72.62	68.37	66.12	69.67	70.47
Jakarta Pusat	59.33	63.4	68.65	77.51	71.72	68.67
Jakarta Barat	67.38	73.42	68.41	72.35	70.87	65.78
Jakarta Utara	73.97	76.08	75.08	72.07	75.81	70.26
DKI Jakarta	68.44	72.49	72.49	70.52	70.51	68.15

Gambar 6. Tabel Rata Rata Komsumsi Protein

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Dari data konsumsi diatas, rata-rata konsumsi protein DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sebesar kisaran 70 Gram. Jumlah konsumsi tersebut sudah melebihi dari standar konsumsi protein setiap harinya yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yaitu sebesar 55 Gram untuk laki-laki dan sebesar 45 Gram untuk perempuan (Kementerian Kesehatan, 2018). Selain konsumsi rata-rata yang sudah memenuhi standar, terjadi peningkatan rata-rata konsumsi protein pada tahun 2018 sebesar 4 Gram sehingga menjadi sebesar 72,49 Gram. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2 Gram menjadi sebesar 70,52 Gram dan pada tahun 2022, rata-rata konsumsi protein menurun menjadi sebesar 68,15 Gram. Dari tren data pengeluaran makanan dan rata-rata konsumsi protein terjadi pola tren yang sama. Maka Program PKH yang telah dijalankan di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi atau pangan masyarakat (Oktaviani et al., 2023).

Program PKH tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi secara jangka pendek, tetapi PKH juga berusaha untuk memutuskan generasi kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan para anak-anak yang berada pada keluarga miskin agar kelak saat dewasa nanti tidak mengalami kemiskinan seperti pada masa kecilnya sehingga generasi kemiskinan akan terputus oleh anak-anak tersebut. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki karena sebagai sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial. Sarana yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan sebuah alat atau jaminan dalam keberlangsungan hidupnya (Aini et al., 2018). Dengan pendidikan yang tinggi, maka

kualitas dari sumber daya manusia akan meningkat sehingga dapat membangun baik dari keluarga pribadi dan bahkan membangun negara menjadi lebih baik lagi (Mustain et al., 2022).

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kep. Seribu	8.25	8.46	8.47	8.68	8.81	9.02
Kota Jakarta Selatan	11.47	11.57	11.62	11.63	11.64	11.66
Kota Jakarta Timur	11.6	11.64	11.65	11.66	11.67	11.73
Kota Jakarta Pusat	11.02	11.24	11.25	11.38	11.39	11.53
Kota Jakarta Barat	10.37	10.38	10.4	10.63	10.78	11.13
Kota Jakarta Utara	10.6	10.69	10.7	10.8	10.81	10.82
DKI JAKARTA	11.02	11.05	11.06	11.13	11.17	11.31

Gambar 7. Rata Rata Lama Sekolah

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, 2024

Dari data diatas, dari tahun 2017 hingga tahun 2022 rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 tahun. Rata-rata sekolah tersebut masih berada dibawah target pendidikan Indonesia yang dimana tercantum dalam pasal 31 UUD Negara Indonesia 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 yang membahas bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengikuti atau menuntaskan wajib belajar selama 12 tahun. Maka lama sekolah yang ada di DKI Jakarta kurang selama 1 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan dari partisipasi sekolah bagi anak-anak. Namun, dari data diatas terlihat adanya peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 11,02 tahun, hal tersebut meningkat pada tahun 2018 dimana rata-rata lama sekolah sebesar 11,05 tahun. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 11,31 tahun. Program PKH juga memberikan dana kepada anggota keluarga yang masih dalam pendidikan, maka dengan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa program PKH yang ditargetkan kepada pengembangan pendidikan anak-anak keluarga miskin sudah berjalan dengan efektif. Pengembangan pendidikan anak-anak keluarga miskin diharap dapat memutuskan kemiskinan keluarganya melalui jalur pendidikan dan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya serta dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di DKI Jakarta.

Dalam menyelesaikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada pada masyarakat, melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010, pemerintah memberlakukan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memerangi kemiskinan. Dengan harapan mengurangi kemiskinan, program ini akan membangun sistem perlindungan sosial yang akan membantu rumah tangga yang sangat miskin mendapatkan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Permasalahan pembangunan utama, rendahnya kualitas sumber daya

manusia dan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk meningkatkan program ini (Sahib, 2021). Mengacu pada amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI, PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat, memberikan bantuan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, cakupan PKH mulai diperluas untuk menyertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia guna menjaga kesejahteraan sosial mereka (Hasan et al., 2020). Berikut data morbiditas DKI Jakarta.

Kab/Kota	Persentase Angka Morbiditas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kep Seribu	19.22	23.63	20.76	10.31	6.42	8.51
Jakarta Selatan	12.38	8.88	12.51	13.68	12.48	4.58
Jakarta Timur	10.1	10.92	10.69	13.34	13.49	3.93
Jakarta Pusat	14.47	12.23	14.99	18.43	5.8	4.06
Jakarta Barat	13.36	9.14	14.16	12.55	7.45	3.63
Jakarta Utara	13.29	10.95	10.3	14.54	11.49	5.6
DKI Jakarta	12.34	10.2	12.27	13.86	10.75	4.31

Gambar 8. Tabel Angka Morbiditas
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2022)

Jika kita lihat data di atas, angka morbiditas di DKI Jakarta terus mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2022. Morbiditas atau tingkat penyakit dalam suatu populasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Selama periode ini, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan morbiditas. Pada tahun 2017, persentase morbiditas di DKI Jakarta tercatat sebesar 12.34%. Angka ini menunjukkan tingkat kesakitan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Pada masa ini, PKH mulai memperkuat fokusnya pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, sebagai langkah awal untuk menurunkan tingkat morbiditas. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan kembali, hal ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tahun 2022 menunjukkan penurunan morbiditas yang sangat signifikan menjadi 4.31%. Angka ini mencerminkan hasil positif dari berbagai intervensi kesehatan, termasuk peran PKH dalam memberikan akses berkelanjutan ke layanan kesehatan yang esensial. Upaya PKH dalam memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan kesehatan, dan dukungan

sosial telah menunjukkan dampak nyata dalam mengurangi tingkat kesakitan di DKI Jakarta (Sugiyana, Kumiansyah, & ..., 2022).

PKH dilaksanakan secara yuridis formal sebagai pelaksanaan beberapa peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat, dan Perpes Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga perilaku yang diharapkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri (Irmayani & Nainggolan, 2015). Kemiskinan sangat mempengaruhi tindakan, perilaku, maupun gaya hidup seseorang. Banyak masalah seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, kriminalitas, dan lain-lain akan muncul sebagai hasil dari mata rantai kemiskinan. Pencurian, pembunuhan, penipuan, perampokan, dan tindakan lainnya dapat muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pamela, 2023).



Gambar 9. Angka Kriminalitas di Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2022)

Berdasarkan grafik di atas, angka kriminalitas di Jakarta sejak tahun 2017 terus mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2021. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2022, berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistika, kelompok kejahatan tertinggi yang di laporkan di DKI Jakarta pada tahun 2022 paling tinggi yaitu kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, lalu yang kedua yaitu kejahatan terhadap hak milik atau barang seperti pencurian dll. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas yang ada di Jakarta di latar belakang oleh kebutuhan dasar atau hidup masyarakat yang tidak terpenuhi dengan baik. Individu yang terperangkap dalam kemiskinan mungkin merasa

terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai upaya bertahan hidup. Situasi seperti ini menciptakan siklus kemiskinan dan kejahatan yang sulit diputus (Siregar & Vientiany, 2023). Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan (PKH) memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas di Jakarta. Dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, PKH membantu meningkatkan akses mereka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, sementara akses yang memadai ke layanan kesehatan memastikan kesejahteraan fisik dan mental. Selain itu, PKH juga berupaya memperkuat kesejahteraan sosial keluarga, sehingga mereka tidak merasa perlu mengambil jalan pintas melalui tindakan kriminal. Dengan demikian, PKH tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Jakarta.

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan terhadap kesenjangan sosial yang memiliki komponen pendidikan seperti anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016, ada tambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria usia lanjut mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan prioritas untuk penyandang disabilitas berat (Sugiyana, Kurniansyah, & Rizki, 2022). Untuk benar-benar mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di Jakarta, efisiensi dan efektivitas dari Program Keluarga Harapan sangat penting untuk diperhatikan. Apabila tujuan dan hasil suatu program sesuai dengan rencana awal dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sugiyana tahun 2022 mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di kecamatan Rengasdengklok didapatkan bahwa sasaran penerima PKH masih kurang tepat, dimana data yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Terdapat penemuan bahwa masyarakat yang masih mampu mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Selain itu, waktu atau jadwal pemberian bantuan yang seringkali tidak jelas dan berubah - ubah membuat penerima manfaat kebingungan, karena lebih dari 50% penyaluran bantuan melalui ATM dan tidak ada pendamping yang menginfokan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Benny Alexandri tahun 2020 mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur juga menyatakan indikator waktu penerimaan PKH sering dikeluhkan oleh penerima karena masalah keterlambatan dan masih ada RTSM yang belum terdaftar dalam PKH. Namun, dilihat dari dimensi efektivitas Program Keluarga Harapan dalam jangka pendek dapat dikatakan sudah tercapai seperti adanya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan (Alexandri, 2020) Dengan kata lain, ditinjau dari aspek tata kelola, Program Keluarga Harapan dinilai efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dalam jangka pendek terutama di Jakarta, masyarakat miskin yang terdaftar

menjadi peserta PKH dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah. Namun, dalam jangka panjang, PKH dinilai dapat menimbulkan efek ketergantungan penerima manfaat atas bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga kemandirian atau perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif minim terjadi (Sofianto, 2020).

Simpulan

Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius pada masyarakat. Penyebab dari kesenjangan tersebut paling utama berasal dari masalah kemiskinan sehingga menyebabkan masalah lainnya seperti masalah sosial, kesehatan, pendidikan, hukum dan sebagainya. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka mengentas kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat seperti yang ada pada wilayah DKI Jakarta. PKH merupakan program yang dilakukan dengan memberikan sejumlah dana untuk keluarga penerima manfaat yang sudah sesuai dengan syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengakses pelayanan pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan. Dampak dari penerapan PKH kepada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta cenderung berdampak positif dan efektif sesuai dengan fungsi dari penerapan program tersebut. Dari aspek sosial seperti komunitas dan pendidikan dinilai sudah mengalami dampak yang positif dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta. Dari aspek ekonomi yaitu konsumsi masyarakat, dimana konsumsi masyarakat terkait makanan terdampak positif dengan meningkatnya pengeluaran makanan pada periode tertentu, namun tetap terjadi penurunan pengeluaran makanan dan meningkatnya pengeluaran bukan makanan. Tetapi, walaupun menurun, rata-rata konsumsi protein masyarakat DKI Jakarta sudah di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dapat disimpulkan adanya peralihan dana dari kebutuhan makanan menjadi kebutuhan lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung kehidupan seperti pakaian, alat komunikasi dan penunjang kegiatan lainnya. Dari aspek hukum dan keamanan sudah dinilai membaik karena adanya penurunan jumlah kriminalitas DKI Jakarta. Walaupun menurun, hukum harus tetap ditegakkan dengan tegas

sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera, aman dan nyaman. Dari segi lingkungan yaitu kesehatan cukup efektif karena adanya penurunan persentase morbiditas di DKI Jakarta sehingga PKH berdampak positif kepada aspek lingkungan kesehatan dan gaya hidup sehat. Selanjutnya untuk tata kelola terutama dalam menentukan target dan sasaran terkait PKH dinilai belum maksimal karena adanya target program yang salah sasaran. Selain itu, terdapat waktu atau jadwal pemberian bantuan yang seringkali tidak jelas dan berubah-ubah dan tidak adanya pendamping sehingga dinilai tidak kompeten dalam pembagian bantuan PKH.

Terdapat permasalahan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yaitu adanya target program yang salah sasaran atau tidak tepat sasaran dan waktu atau jadwal pemberian bantuan yang seringkali tidak jelas dan berubah-ubah serta tidak adanya tidak adanya peran pendamping yang dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi keluarga penerima manfaat terkait informasi terbaru dari PKH tersebut. Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pengecekan data dan validasi data penerima manfaat agar memastikan kesesuaian syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam membagikan PKH tersebut.
2. Melakukan evaluasi terkait penyaluran program PKH agar dapat terkontrol penyaluran program tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Selain penyaluran, melakukan evaluasi terkait jadwal pembagian PKH agar dapat mengetahui waktu yang tepat untuk membagikan PKH tersebut sehingga PKH dapat tersalurkan dengan baik dan lancar.
3. Implementasi penggunaan teknologi digital sebagai sarana informasi yang cepat dan efisien sehingga informasi tersebut dapat langsung diterima oleh masyarakat. Teknologi tersebut bisa bekerja sama dengan media massa dalam menyampaikan informasi program PKH tersebut.

Daftar Pustaka

- Aini, E. N., Isnaini, I., Sukamti, S., & Amalia, L. N. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58–72. <https://doi.org/10.33050/tmj.v3i1.333>
- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237–244.
- Almatsier, S. (2009). Prinsip dasar ilmu gizi. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amala, R., & Mayang, A. R. (2018). Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi. *Ekonomi Islam*, 14.
- Azzahra, T. A. (2022, June 22). Kemendagri Sentil DKI: 132.345 Penduduk Jakarta Miskin Ekstrem! <https://News.Detik.Com/Berita/d-6141640/Kemendagri-Sentil-Dki-132-345-Penduduk-Jakarta-Miskin-Ekstrem>.
- Bela, S., & Sarmini, S. (2024). Analisis Penggunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13982>
- Emalia, Z., Budiarty, I., & Ratih, A. (2021). Pendampingan Kelompok Wanita Program Keluarga Harapan (PKH) Craft “Wanita Mandiri” di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JNM/article/view/656>
- Ernawati, F., Prihatini, M., & Yuriestia, A. (2016). Gambaran Konsumsi Protein Nabati Dan Hewani Pada Anak Balita Stunting Dan Gizi Kurang Di Indonesia (the Profile of Vegetable-Animal Protein Consumption of Stunting and Underweight Children Under Five Years Old in Indonesia). *Penelitian Gizi Dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*, 39(2), 95–102.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah*, 33–54.
- Fahmi, N., & Anwar, K. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Bertuah *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* <https://beta.monevdpupr.com/index.php/Bertuah/article/view/168>
- Fikri, I. (2023). Pengembangan Aplikasi Manajemen Peserta Penerima Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknologi*. <https://jitekin-upiypk.org/ojs/index.php/Teknologi/article/view/94>
- Hasibuan, M. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Bumi Aksara.
- Hummairoh, S., Rahmadhani, A., & ... (2021). Penerapan WASPAS Dalam Menentukan Kelayakan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kelurahan Sudirejo-I. *Seminar Nasional Sains* <http://seminar-id.com/prosiding/index.php/sensasi/article/view/671>
- Iqbal, M. (2022). Implementasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Nalu. *Media Bina Ilmiah*. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/182>

- Irmayani, I., & Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Menjelang Exit Program di Jakarta Utara. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(3), 177–193.
- Irmayani, I., & Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Menjelang Exit Program di Jakarta Utara. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(3), 177–193.
- JUHAD, H. (2021). Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Lombok Timur. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*.
<https://www.jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/view/106>
- Kementerian Kesehatan. (2018, August 27). Apakah diet protein tinggi benar-benar sehat? Jawabannya mengejutkan. <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Tag/Apakah-Diet-Protein-Tinggi-Benar-Benar-Sehat-Jawabannya-Mengejutkan#:~:Text=Jadi%2C%20rata%2Drata%20laki%2D,Tahu%2C%20atau%20kacang%2Dkacangan>.
- Kementerian Keuangan. (2021). Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.
- Kementerian Sosial. (2019, August 9). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Kementerian Sosial. (2023, October 16). Pemberitaan Terkait Data Penerima Bansos DKI. <https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-menjelaskan-pemberitaan-terkait-data-penerima-bansos-dki>.
- Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Sidoarjo. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan ...*
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1675>
- Lestarie, T. L., Alviansyah, M., Putri, S., Rosidin, E. R. P., & ... (2024). Evaluasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Tasikmalaya Sektor Wilayah *NUSANTARA Jurnal ...* <https://prin.or.id/index.php/nusantara/article/view/2241>
- Moleong, L. J. (1998). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustain, M. M., Purnomo, H., & Junaedi, J. (2022). Keefektifan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Journal of Public Power*. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/jpp/article/view/72>
- Nugraha, M. R. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan ...* <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3313>
- Oktaviani, I. N., Rawita, I. S., & Siregar, H. (2023). Penggunaan pendekatan kelompok pada program pendampingan keluarga harapan. *Empiricism Journal*. <https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/1185>

- Pamela, Q. (2023). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan etimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Kriminalitas di Jawa Timur Tahun 2014-2021. Universitas Tidar.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024, January 23). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://www.jakarta.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Rahmi, A. A., Hizriyani, R., & Sopiah, C. (2022). Analisis Teori Hierarki of Needs Abraham Maslow Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(3), 320–328. <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i3.385>
- Rizaty, M. A. (2022, January 28). Tingkat Ketimpangan Penduduk DKI Jakarta Terus Meningkat selama Pandemi. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/01/28/Tingkat-Ketimpangan-Penduduk-Dki-Jakarta-Terus-Meningkat-Selama-Pandemi>.
- Saharuddin, E. (2022). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANTUL. *TheJournalish: Social and Government*. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/273>
- Sahib, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal Of Economics And Islamic Economics*, 1(2), 1–13.
- Sari, S. N., & Gunawan, C. (2022). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukaraja. *Jurnal Multidisiplin Madani*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/1084>
- Siregar, K. H., & Vientiany, D. (2023). Pembinaan Industri Kreatif Kelompok Wanita Program Keluarga Harapan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* <https://pdfs.semanticscholar.org/4a7f/40713cd22e7f6c14441baec78ca0ddc01e1c.pdf>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan* <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2091>
- Sugiyana, R., Kurniansyah, D., & ... (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rengasdengklok. *JISIP (Jurnal Ilmu* <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2827>
- Sugiyana, R., Kurniansyah, D., & Rizki, M. F. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2827>
- Sumantri, B. A., Ahmad, N., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2019). Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 1–18.
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>